

JURNAL MANAJEMEN VOL. 4 NO. 1 JUNI 2014

PENGENTASAN KEMISKINAN DI ARAS LOKAL
*(Studi Kasus di Desa Rutong dan Desa Leahari, Kecamatan Leitimor Selatan
Kota Ambon, Provinsi Maluku)*

Simon Pieter Soegijono

Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Indonesia Maluku

petersoegijono@gmail.com

Abstrack

There was a lot of study about the proverty phenomenon of society. Most of them aim at proverty character and to observe poor people's eforts as individual or society group to fulfil their life needs, and their capability to survive as well. In case, proverty problem became important notice of stake holders, include government and non government organization. It also considered from all perspective, like social, economy dan culture for decreasing the amount of poor people. At the very least, it done by qualitative approach with study case, can reveal the proverty problem. This research is done at Rutong and Leahari villages, subdistrict Leitimur Selatan Ambon city.

Key words: motivation, social capital, survival strategy

Latar Belakang

Sebagai masyarakat yang hidup di provinsi bergelar ‘*seribu pulau*’, rasa keterkejutan terjadi manakala Badan Pusat Statistik Nasional melansir angka kemiskinan di 33 provinsi di Indonesia; Provinsi Maluku menempati urutan ketiga jumlah angka kemiskinan tertinggi. Mengapa “terkejut”, dan apa dasarnya?. Sesungguhnya jika kita menghubungkan data tersebut dengan posisi Provinsi Maluku sebagai salah satu provinsi kepulauan, maka sangat paradoks dengan kekayaan yang dimiliki. Karena sumber daya alam yang melimpah, dengan 90 persen wilayah adalah laut, dan 10 persen selebihnya daratan (BPS Maluku, 2012). Paling tidak posisi teritori ini menegaskan bahwa sesungguhnya dengan mengelola potensi sumber daya laut, setidaknya mampu memberikan derajat kehidupan lebih baik bagi masyarakatnya. Namun fakta tersebut jauh dari kenyataan yang seharusnya. Keterkejutan semakin menyeruak tatkala Provinsi Maluku diumumkan berada pada urutan ketiga provinsi katagori “termiskin” di Indonesia. Data yang tersaji menyebutkan

bahwa jumlah penduduk miskin di Maluku pada bulan Maret 2011 sebesar 360.320 orang atau 23,00 persen (BPS, 2011), dari total penduduk sebanyak 1.301.962. Angka kemiskinan yang tersaji, justru masih berpusat di daerah perdesaan, bila dibandingkan dengan wilayah perkotaan, seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Maluku
Menurut Daerah, 2002-2011

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin			Persentase Penduduk Miskin		
	Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa	Kota+Desa
2002	40.200	378.600	418.800	12,76	42,82	34,78
2003	41.900	358.000	399.900	12,53	40,56	32,85
2004	41.100	356.500	397.600	11,99	39,86	32,13
2005	45.100	366.400	411.500	13,57	38,89	32,28
2006	46.200	372.400	418.600	13,86	39,87	33,03
2007	49.100	355.600	404.700	14,49	37,02	31,14
2008	44.700	346.700	391.300	12,97	35,56	29,66
2009	38.770	341.240	380.010	11,03	34,30	28,23
2010	36.350	342.280	378.630	10,20	33,94	27,74
2011	59.600	300.720	360.320	10,24	30,54	23,00

Sumber: BPS Maluku 2011 - Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Tabel 1.2
Indikator Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009-2010

Daerah	Garis Kemiskinan (Rp/bulan)		Presentase Penduduk Miskin (%)		Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010
Maluku Tenggara Barat	193.729	219.903	37,23	33,93	58.861	35.729
Maluku Tenggara	204.461	232.085	30,71	30,70	30.063	29.576
Maluku Tengah	252.393	286.493	30,48	28,41	101.755	102.561
Buru	243.741	276.672	27,57	24,82	37.606	26.836
Kepulauan Aru	204.195	231.783	38,77	34,96	28.501	29.334
Seram Bagian Barat	210.595	239.048	33,11	30,08	47.967	49.487
Seram Bagian Timur	206.480	234.377	34,67	31,44	29.294	31.109
Maluku Barat Daya	--	234.688	--	39,22	--	27.578
Buru Selatan	--	333.337	--	21,82	--	11.685
Kota Ambon	268.913	305.245	7,61	7,67	21.130	25.304
Kota Tual	206.352	234.232	30,42	32,01	13.937	18.570
Maluku	207.771	226.030	28,23	27,74	369.114	387.769
Indonesia	200.262	211.726	14,15	13,33	32.530.000	31.023.390

Sumber: TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan), Oktober 2011

Sumber data TNP2K di atas, menunjukkan variasi jumlah penduduk miskin di Provinsi Maluku per kabupaten/kota. Secara komulatif, Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kabupaten/Kota masih harus bekerja keras

untuk mengurangi angka kemiskinan tersebut. Jumlah 387.769, bukanlah jumlah yang tergolong sedikit, dan mudah untuk mengatasinya. Untuk Kota Ambon, sebaran rumah tangga miskin, lebih rinci dapat ditunjukkan data sebagai berikut;

Tabel 1.3
Rekapan Data KK Miskin Kota Ambon
per Kecamatan Tahun 2007-2011

No	Kecamatan	2007		2008		2009		2010		2011	
		KK Miskin	%	KK Miskin	%	KK Miskin	%	KK Miskin	%	KK Miskin	%
1	Sirimau	2.741	12,94	2.766	12,46	2.904	12,15	2.884	11,15	2.845	10,86
2	Nusaniwe	2.598	13,50	3.019	15,38	3.130	15,68	3.034	15,13	3.054	14,74
3	Baguala	3.253	27,00	2.548	25,89	2.528	24,68	2.482	22,91	3.225	29,53
4	Teluk Ambon	1.847	25,75	1.720	22,84	1.622	20,78	1.622	20,52	1.670	20,74
5	Leitimur Selatan	504	23,54	521	23,35	506	22,62	501	22,49	462	20,45

Sumber: Badan BPMP dan KB Pemerintah Kota Ambon, 2012 (diolah)

Penyajian data di atas menggambarkan sebaran masyarakat miskin antara kota dan desa. Tentu, kita harus memahami bahwa dalam ukuran ekonomi ‘tertentu’, antara kota dan desa memiliki permasalahan berbeda. Sehingga sulit untuk mengidentifikasi secara jelas kondisi kemiskinan yang dialami masyarakat. Selain itu, definisi dan ukuran kemiskinan yang digunakan untuk menentukan seseorang atau kelompok atau rumah tangga yang dikategorikan sebagai orang atau kelompok miskin pun berbeda. Di sini, sesungguhnya makna kemiskinan yang merupakan produk ‘negara’ dalam menentukan ukuran kemiskinan di masyarakat mengalami perbedaan pandang (*debatable*).

Konsep kemiskinan yang ada tentu akan berbeda dengan perspektif masyarakat itu sendiri. Kemiskinan dalam berbagai perspektif akan berbeda satu dengan yang lain. Pada prinsipnya, miskin dalam konteks yang lebih luas akan memberikan makna yang berbeda. Kondisi miskin si A, akan berbeda dengan kondisi miskin si B. Masing-masing akan mengatakan miskin menurut ukurannya. Tentu, bagi masyarakat ukuran kemiskinan sangat relatif sifatnya. Belum lagi miskin menurut pemerintah dengan

berbagai ukuran dan standarisasi yang digunakan.

Masih tingginya angka kemiskinan di Kota Ambon, dapat dijelaskan dengan menangkap permasalahan yang dialami kelompok rumah tangga yang disebut miskin. Padahal, ‘negara’ telah meluncurkan berbagai upaya yang dikemas dalam bentuk program untuk mengatasi masalah kemiskinan. Beberapa kegiatan yang telah direalisasikan antara lain; melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Penyaluran KUR di Kota Ambon pada tahun 2011 mencapai Rp210,1 miliar untuk 7.072 nasabah. Meningkat hampir 100% bila dibandingkan dengan tahun 2010, yang direalisasi KUR kepada 3.725 nasabah dengan nilai Rp104,5 miliar (Laporan KBI Cabang Ambon). Selain KUR, pemerintah juga mendorong UMKM melalui Koperasi untuk menyerap tenaga kerja. Sejak tahun 2005, terdapat 1.137 orang, meningkat sebanyak 2.352 orang pada tahun 2011 (Dinas Koperasi, UMKM Kota Ambon). Program pemerintah yang lainnya adalah PNPM Mandiri. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kemudahan anggota masyarakat miskin untuk mengakses layanan publik. Berbagai program PNPM Mandiri telah direalisasikan, dengan dana mencapai Rp2,4 miliar di tahun 2011, dan

tahun 2012 dialokasikan dana sebesar Rp3,4 miliar untuk enam kecamatan di Kota Ambon. Banyaknya program yang didaratkan bagi warga miskin, ternyata tidak secara signifikan mempengaruhi menurunnya angka kemiskinan.

Untuk mengatasi permasalahan kemiskinan, diperlukan juga kajian yang bersumber dari aktivitas masyarakat yang dikatakan miskin tersebut. Artinya pandangan masyarakat dan segala aktivitasnya, perlu mendapat perhatian untuk menangkap makna kemiskinan dan langkah-langkah apa yang diperlukan untuk mengintervensi, sehingga mereka tidak terperangkap semakin dalam pada situasi kemiskinan. Paling tidak, penelitian dan temuan ini akan membantu pemerintah mengurangi angka kemiskinan.

Bagi pemerintah daerah, tentu kekuatan implementasi program harus didukung dengan ketersediaan anggaran pembangunan yang bersumber dari APBD. Sementara, banyak program pembangunan yang direncanakan dan dihasilkan oleh pemerintah daerah hanya merupakan komitmen politik yang tertuang dalam batang tubuh APBD. Walaupun pelaksanaan Otonomi Daerah (Otda) atau era desentralisasi di Indonesia, telah dimulai dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Namun demikian implementasi anggaran bagi pelaksanaan program masih ditemui beberapa permasalahan antara lain: (1) masih lemahnya koordinasi antarlevel pemerintahan (di pusat, pusat dan daerah, provinsi dan kabupaten/kota, serta antardaerah). (2) Pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah belum menampakkan perubahan secara signifikan terhadap kuantitas dan kualitas pelayanan publik. (3) Lemahnya kapasitas dalam perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan keuangan. (4) melonjaknya biaya rutin/*overhead cost* dan mis-alokasi anggaran. Karena itu, optimalisasi pemanfaatan anggaran bagi kepentingan masyarakat oleh Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah perlu terus digalakan. Terutama pada program-program pro-rakyat. Artinya APBD tersusun karena kebutuhan dan realitas “keterpurukan” yang dialami masyarakat. Tidak terkecuali masalah kemiskinan yang masih mendera masyarakat.

Permasalahan kemiskinan yang telah digambarkan di atas, secara umum mengakibatkan sumber daya manusia mengalami degradasi. Secara langsung kemiskinan mempengaruhi perhitungan angka *Human Development Index*—Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Perhitungan ini didasarkan pada indikator dari aspek pendidikan dan kesehatan. Simak saja data IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Provinsi Maluku melalui data Badan Pusat Statistik Nasional 1996-2010. Tercatat Provinsi Maluku mengalami variasi perubahan yang cenderung menurun secara rata-rata nasional. Perubahan tersebut terjadi karena berbagai pertimbangan. Data yang tersaji menunjukkan bahwa IPM Provinsi Maluku sejak lima belas tahun terakhir, hanya pada tahun 1996, berada pada ranking ke lima secara nasional sebesar 67,2. Tahun 2008 dan 2009, IPM Provinsi Maluku secara nasional berada pada ranking ke 19. Tahun 2010 IPM Provinsi Maluku kembali mengalami penurunan rata-rata secara nasional dan berada pada ranking ke 20 dari 33 provinsi se Indonesia. Namun demikian jika diperhatikan angka indeks IPM sejak tahun 1996 sampai dengan tahun 2010 terus mengalami peningkatan. Angka IPM tertinggi Provinsi Maluku di tahun 2010 sebesar 71,42. Sementara rata-rata angka IPM sejak tahun 1996-2009 sebesar 69,96.

Karena itu, penelitian ini lebih difokuskan pada masalah kemiskinan dalam suatu proses pembangunan di Kota Ambon. Asumsi dasar yang melatar-belakangi pertimbangan ini antara lain, bahwa kemajuan satu daerah sangat ditentukan oleh kualitas kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar untuk mencapai kesejahteraan. Semakin baik tingkat kehidupan masyarakat, semakin baik proses pembangunan dan capaian kinerja

pemerintah daerah. Mungkin sederhana, tetapi makna dan relevansi harus dibuktikan melalui keterlibatan bersama masyarakat untuk menangkap berbagai variasi-variasi pengakuan dan keluhan masyarakat. Tantangan yang dihadapi pemerintah daerah tidaklah mudah untuk mengatasi masalah kemiskinan. Keterbatasan sumber pembiayaan adalah salah satu faktor penyebabnya. Sehingga diperlukan langkah-langkah yang kreatif, inovatif dan mengutamakan ciri khas wilayah masing-masing merupakan salah satu langkah untuk menyusun kebijakan pembangunan untuk mengurangi angka kemiskinan (*poverty reduction*).

Permasalahan

Data kemiskinan di Kota Ambon Provinsi Maluku merupakan salah satu potret 'kegagalan negara' mengatasi masalah kemiskinan. Sementara di sisi lain, berbagai program intervensi pengentasan kemiskinan dari tingkat nasional dan lokal telah digulirkan. Namun fakta menunjukkan bahwa masalah kemiskinan masih belum terselesaikan. Minimal angka kemiskinan tersebut secara kuantitatif tidak mengalami penurunan yang signifikan. Tentu, kondisi kemiskinan yang terjadi di masyarakat, sesungguhnya banyak dimensi yang dapat menjelaskannya. Penyebab kemiskinan terjadi antara lain karena, tekanan struktur, relasi sosial, ketidak-berdayaan dan lemahnya akses ekonomi, daya dukung infrastruktur serta lingkungan sosial budaya yang tertanam (*embeddedness*) dalam kehidupan masyarakat.

Sesuai latar belakang dan rumusan masalah, berikut ini terdapat pertanyaan penelitian (*research quistion*) yang patut diungkapkan untuk dikaji adalah, bagaimana praksis kelompok keluarga miskin, mengatasi masalah kemiskinan dan sejauhmana peran Pemerintah Kota Ambon, menyelesaikan permasalahan kemiskinan di masyarakat?.

Tinjauan Pustaka

Kajian mengenai penyebab kemiskinan selama ini umumnya dihubungkan dengan tiga faktor, yakni faktor sosial yang tidak adil dan berpotensi menyebabkan kemiskinan atau sering dikaitkan dengan kemiskinan struktural, faktor alamiah, dan faktor budaya (*culture*) yang membuat orang hidup miskin (Rahoyo, 2010). Kemiskinan struktural umumnya akibat dari kebijakan 'negara' yang mengakibatkan masyarakat kesulitan mengatasi masalah kebutuhan hidup. Kemiskinan alamiah umumnya akibat dari kondisi alam seperti wilayah yang tandus, kekeringan akibat sumber air dan sebagainya. Kemiskinan karena faktor budaya terkait dengan sikap hidup dan perilaku yang tidak memberikan kesempatan sentuhan perubahan masuk ke dalam struktur kehidupan kelompok. Ditambah dengan motivasi individu dan atau kelompok yang belum jelas.

Sebelum jauh meninjau kajian teoritis tentang pembahasan kemiskinan, motivasi manusia, rumah tangga dan pemenuhan kebutuhan hidup serta modal sosial, alangkah baiknya kita sepintas meninjau masalah struktural yang menjadi salah satu penyebab kemiskinan itu terjadi. Salah satu sumber penyebabnya peran 'negara' lemah untuk mengatasi kemiskinan adalah komitmen politik anggaran yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Mengingat bahwa salah satu sumber pembiayaan pembangunan adalah APBD.

Menurut Wayong (1999:81) APBD adalah suatu rencana pekerjaan keuangan (*financial workplan*) yang dibuat untuk suatu jangka waktu tertentu pada waktu badan legislatif memberikan kredit kepada badan-badan eksekutif untuk melakukan pembiayaan guna memenuhi kebutuhan rumah tangga daerah sesuai dengan rancangan yang menjadi dasar (*groundslag*) penetapan anggaran, dan yang menunjukkan semua penghasilan untuk menutup pengeluaran tadi.

Istilah yang dimaksud dari APBD yaitu: Anggaran, dalam arti *begrooting* dan *estimate* mempunyai makna penentuan, patokan atau penetapan besarnya uang. Pendapatan, atau *inkomen* dalam arti *revenue* atau penerimaan mempunyai makna untuk membiayai pengeluaran diperlukan sumber-sumber penerimaan. Belanja, atau *government expenditure* atau pengeluaran-pengeluaran pemerintah mempunyai makna pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas/fungsinya jelas memerlukan dan melakukan pengeluaran-pengeluaran. Sedangkan tindakan-tindakan yang berakibat untuk melakukan pengeluaran tersebut diperlukan sumber daya ekonomi yang berupa atau dinyatakan dengan penggunaan uang. Daerah, mempunyai makna daerah otonom yang sebagai badan hukum publik dalam bentuk organisasi yang menjadi alat kekuasaan dalam menjalankan pemerintahan di daerah (Ritonga, 2010:2). APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). APBD oleh pemerintah daerah digunakan sebagai dasar untuk melakukan aktivitas pengeluaran dan masyarakat dalam melakukan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Tidak terkecuali lokasi penelitian di wilayah Pemerintahan Kota Ambon.

Ketika pemerintah daerah selalu serius dan *concern* bagi rakyatnya melalui APBD, pertanyaannya adalah apakah masyarakat juga telah turut serta mempersiapkan diri dan mendukung kebijakan pembangunan pemerintah daerah?. Ataukah masyarakat hanya bersifat menunggu 'pemberian' dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Perspektif Kemiskinan

Banyaknya pengertian tentang kemiskinan, tetapi secara umum dapat dikatakan bahwa istilah kemiskinan selalu menunjuk pada sebuah kondisi yang serba

kekurangan. Dalam kaitan itu, kondisi serba kekurangan bisa saja diukur secara objektif, dirasakan secara subjektif atau secara relatif didasarkan pada perbandingan dengan orang lain sehingga melahirkan pandangan objektif, subjektif dan relatif tentang kemiskinan. Selain itu, kondisi serba kekurangan juga bukan hanya dilihat dari sisi ekonomi, tetapi juga dari sisi sosial budaya termasuk sisi hegemoni kultural di dalamnya.

Ada juga pandangan tentang kemiskinan material, yaitu kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan fisik minimum, dapat diukur dengan berbagai kriteria (Yuwono, 2005). Dalam perspektif ini Yuwono juga merujuk pada pandangan bahwa kemiskinan pada awalnya diukur secara universal dengan 'garis kemiskinan', yang bertolak dari suatu definisi kemiskinan yang ditinjau dari sudut ekonomi. Garis kemiskinan relatif diperkenalkan oleh oleh Remenyi (Yuwono, 2005) menggunakan ukuran 50% dari pendapatan per kapita.

Dari pandangan ini sesungguhnya kemiskinan material terlepas dari apapun katagori pengukurannya, selalu menjadi masalah pembangunan di berbagai negara di dunia. Hampir sebagian besar program utama negara-negara di dunia mengarahkan energi untuk mengurangi angka kemiskinan. Karena itu, kemiskinan tidak hanya sebagai akibat struktur, tetapi juga karena alam. Pada sisi lain, kemiskinan dapat saja diakibatkan oleh kondisi lingkungan alam. Salah satu contoh rujukannya adalah Kusnadi (2006) yang mengatakan bahwa kemiskinan nelayan serta kerusakan lingkungan pesisir dan laut merupakan dampak dari kebijakan pembangunan yang selama ini berorientasi ke daratan. Sekalipun sejak tiga dasawarsa terakhir pemerintah menggulirkan kebijakan modernisasi perikanan (*blue revolution*) untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, mereka masih terperosok dalam perangkap kerentanan sosialekonomi yang berkepanjangan. Ironi besar di tengah-tengah kekayaan sumber daya kemaritiman yang melimpah.

Karena itu, kita bisa menggunakan pandangan Glewwe dan Van der Gaag (Vel, 2010:199) bahwa mendefinisikan kemiskinan mempunyai kaitan dengan cara memilih nilai-nilai standar untuk indikator-indikator khusus atau cara menandai suatu 'garis kemiskinan'. Jenis indikator dan garis kemiskinan yang dipilih seseorang harus sesuai dengan tujuan pengkajian. "tindakan-tindakan pemberantasan kemiskinan secara umum yang bertujuan mengendalikan secara menyeluruh sumber daya kaum miskin, seharusnya menerapkan definisi-definisi umum tentang kemiskinan, misalnya tingkat konsumsi per kapita".

Paling tidak sepintas pandangan tentang konsep kemiskinan dapat kita pahami sebagai pintu masuk penelitian ini. Untuk tidak terjadi kekeliruan menjelaskan fenomena kemiskinan maka diperlukan kehati-hatian untuk menjawab pertanyaan penelitian. Bila dalam realitasnya kemiskinan tersebut terjadi karena bukan ukuran kemiskinan yang dipakai oleh berbagai lembaga Negara, bukan tidak mungkin terjadi redefinisi terhadap konsep kemiskinan menurut masyarakat lokal. Apalagi kehidupan masyarakat yang dikategorikan miskin serba terbatas dan pas-pasan—kalau tidak ingin dikatakan sebagai keluarga miskin, untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Salah satu yang mungkin dapat membantu masyarakat ke luar dari kondisi kemiskinan adalah dengan memberikan penguatan kewirausahaan. Sifat wirausaha sangat berpengaruh terhadap motivasi usaha. Pengaruh yang demikian dapat dipahami sebagai sifat wirausaha menjadi faktor pendorong motivasi yang kuat untuk berusaha. Dengan semangat dan motivasi yang tinggi akan mendorong motivasi mereka untuk berprestasi dan menumbuhkan kegiatan wirausahaannya (*push motivation*) (Priyanto, 2008). Atas dasar ini, ada beberapa pandangan teoritis dapat membantu menjelaskan konsep motivasi.

Dalam berbagai kegiatan manusia, perilakunya akan tercermin pada pekerjaan

dan aktivitas yang dilakukan, baik itu aktivitas yang bersifat individu, kelompok, maupun organisasi. Pekerjaan yang dilakukan setiap individu di dalam mencapai suatu tujuan tertentu pada prinsipnya tidak terlepas dari motivasi yang ada dalam diri setiap individu dimaksud. Motivasi itu selalu ada dalam kegiatan yang bersifat individu maupun bersifat organisasi. Dan karenanya ketika motivasi itu muncul, maka perilaku akan diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Soegijono, 2000).

Motivasi yang memunculkan perilaku, telah banyak diteliti oleh para ahli sebelumnya. Hasil yang diperoleh dari studi-studi dimaksud telah memunculkan berbagai definisi tentang motivasi itu sendiri. Tetapi pada prinsipnya semua definisi dimaksud mengarah pada satu pengertian saja. Pengertian dimaksud seperti yang disampaikan oleh Gibson, Ivancevic dan Donnelly (Suwanto, 1999:77) bahwa motivasi ialah suatu konsep yang menguraikan tentang kekuatan-kekuatan yang ada dalam diri karyawan yang memulai dan mengarahkan perilaku. Demikian juga menurut Victor Vroom (Gibson et.al, 1996:145) bahwa motivasi sebagai proses pengaturan pilihan di antara bentuk-bentuk aktivitas sukarela alternatif dan sebagian besar perilaku dianggap berada di bawah pengendalian orang dan karenanya di motivasi.

Demikian pula menurut Sukanto Reksohadiprodjo (1999:252) bahwa motivasi adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai tujuan. Motivasi yang ada pada seseorang akan mewujudkan suatu perilaku yang diarahkan pada tujuan mencapai sasaran kepuasan. Sama halnya yang dilakukan oleh Stephen P. Robbins (Suwanto, 1999:77). Sama halnya dengan pandangan teori motivasi dari Abraham Maslow (Reksohadiprodjo, 1999 : 259-260) yang pada intinya menjelaskan suatu hirarki kebutuhan (*hierarchy of needs*) yang menunjukkan adanya lima tingkatan

keinginan dan kebutuhan manusia. Kebutuhan yang lebih tinggi akan mendorong seseorang untuk mendapatkan kepuasan atas kebutuhan tersebut, setelah kebutuhan yang lebih rendah dipuaskan. Kelima kebutuhan Maslow tersebut adalah : (a). kebutuhan fisiologis (*physiological needs*), (b) kebutuhan keamanan (*safety needs*), (c) kebutuhan sosial (*social needs*), (d) kebutuhan akan penghargaan (*esteem needs*), dan (e) kebutuhan aktualisasi diri (*self – actualization needs*).

Rumah Tangga dan Upaya Pemenuhan Kebutuhan Hidup

Pada bagian ini, diskusi tentang kemiskinan tidak terpisahkan dengan rumah tangga (*household*) dan pemenuhan kebutuhan hidup. Rumah tangga merupakan suatu unit sosial yang muncul untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya. Itulah sebabnya ketika rumah tangga harus dihidupi maka anggota rumah tangga setidaknya harus memiliki mata pencaharian sebagai bagian dari upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup berkelanjutan. Sehingga mampu memenuhi tuntutan kebutuhan hidup anggotanya. Ketika tekanan kebutuhan ekonomis keluarga mengimpit, maka seluruh anggota keluarga akan menjadi aktor perubahan. Sehingga pilihan memulai usaha atau mencari pekerjaan adalah tujuan untuk pemenuhan kebutuhan hidup keluarga.

Pemenuhan kebutuhan hidup sebagaimana pandangan Carswell (Bryceson, 1999) merupakan suatu bentuk kemampuan individu menghimpun aset sebagai sarana untuk hidup. Demikian pula menurut pandangan de Haan dan Zoomers (Marschkel dan Berkes, 2006) Konsep pemenuhan kebutuhan hidup adalah usaha yang dilakukan individu, rumah tangga, atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan, melalui penyediaan konsumsi dan kebutuhan ekonomi lainnya, menghadapi situasi ketidakpastian, dan menciptakan peluang baru. Kedua pandangan tersebut setidaknya mengarahkan bahwa pemenuhan kebutuhan hidup merupakan suatu upaya mengatasi

tekanan dan keguncangan, untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan yang dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya, baik masa sekarang dan untuk masa depan secara berkelanjutan.

Perspektif Modal Sosial

Dalam perkembangan penggunaan konsep modal sosial, ternyata bukan saja sebagai pendekatan ekonomi, namun telah berkembang pada berbagai disiplin ilmu seperti ilmu hukum, ilmu politik, sosiologi dan antropologi (CRP, 2003:7). Perkembangan ini mengakibatkan munculnya berbagai pendapat dan gagasan yang sering menimbulkan perdebatan serius tentang penggunaan konsep modal sosial. Terlepas dari perdebatan terhadap penggunaan konsep modal sosial, ada baiknya pemanfaatan modal sosial oleh beberapa ahli dapat dikemukakan sebagai kerangka tinjauan dalam memetakan, masalah kemiskinan. Dengan demikian memahami modal sosial, setidaknya membantu memahami modal sosial dalam aktivitas rumah tangga miskin. Seperti pendapat James Coleman (2000:16; Serageldin dan Grootaert, 2000 : 46):

“A variety of different entities, with two elements in common: they all consist of some aspect of social structure, and they facilitate certain actions of actors – whether personal or corporate actor – within the structure”.

Coleman menjelaskan bahwa ternyata tidak hanya satu entitas dalam struktur sosial yang memfasilitasi suatu tindakan individu atau kelompok, tetapi justru lebih dari satu kategori dari entitas-entitas yang berbeda dengan dua unsur yang sama: mereka semua terdiri dari beberapa aspek struktur sosial, dan mereka memfasilitasi tindakan-tindakan tertentu dari para aktor baik individu maupun lembaga – di dalam suatu struktur. Sementara Robert Putnam (Serageldin dan Grootaert, 2000 : 45): *“A set of horizontal*

associations among people who have an effect on the productivity of the community“.

Lain halnya dengan Putnam yang melihat modal sosial sebagai suatu kumpulan asosiasi-asosiasi yang bersifat horisontal diantara orang-orang yang mempunyai pengaruh terhadap produktivitas dari masyarakat setempat. Hubungan-hubungan yang bersifat horisontal dimaknai oleh Putnam sebagai suatu kekuatan yang mampu melakukan perubahan-perubahan mendasar, terutama ketika individu dan kelompok memiliki tujuan tertentu yang hendak dicapai. Hubungan tersebut tidak hanya atas kepentingan terbatas, tetapi pada kepentingan yang dirasakan bersama, sehingga dengannya kepentingan tersebut dapat dicapai. Kajian Putnam berangkat dari institusi sosial yang di dalamnya terdapat jaringan, norma dan kepercayaan. Hubungan-hubungan ini menurutnya merupakan kunci keberhasilan ekonomi dan demokrasi. Perubahan yang diharapkan dari jejaring usaha, diwujudkan dalam bentuk pembentukan modal manusia (*human capital*).

Sejalan dengan pendapat Putnam, gagasan lain juga dikemukakan oleh Jonathan H. Turner (2000:95) bahwa dalam masyarakat terdapat suatu kekuatan yang darinya dapat meningkatkan potensi untuk dimanfaatkan bagi proses perkembangan ekonomi masyarakat, sehingga kekuatan tersebut dapat menciptakan dan mempertahankan hubungan sosial dan pola organisasi sosial. Hubungan sosial yang diciptakan individu merupakan kekuatan yang memiliki potensi bagi perkembangan ekonomi. Pada sisi lain, Woolcock and Narayan (Callois and Angeon, 2004 : 3-5) bahwa sesungguhnya mengarah pada norma-norma dan jaringan-jaringan yang memungkinkan masyarakat untuk bertindak secara bersama-sama. Lebih lanjut, Woolcock dan Narayan mengembangkan konsep yang sering dipakai dalam berbagai analisis secara empiris pada bidang sosiologi, ekonomi dan lainnya.

Konsep Woolcock and Narayan (Callois and Angeon, 2004 : 3-5), dikenal dengan tiga tipe *social capital*: tipe pertama, *bonding social capital*, yang berhubungan dengan relasi-relasi di antara kelompok-kelompok yang sama seperti suku, agama, antar golongan dimana kelompok ini akan memperkuat ikatan-ikatan sosial pada kelompoknya. Tipe kedua, *bridging social capital*, menunjuk pada hubungan-hubungan antar kelompok yang berbeda, dan kelompok yang berbeda ini akan memperkuat ikatan-ikatan diantara kelompok-kelompok tersebut. Tipe ketiga adalah, *linking social capital*, yang menunjuk pada hubungan-hubungan antar individu-individu dan kelompok-kelompok dalam strata sosial yang berbeda dalam suatu struktur.

Beberapa gagasan di atas, jika dicermati maka sebetulnya terdapat kata kunci yang mendasari kesimpulan pandangan mereka. Walaupun pandangan-pandangan tersebut berangkat dari perspektif dan kajian empiris yang berbeda dan memiliki tujuan yang berbeda pula. Namun sesungguhnya pandangan mereka mengarah pada satu tujuan pokok yaitu adanya upaya untuk membangun dan memperkuat suatu komunitas/ masyarakat yang dapat mengembangkan diri dan kelompoknya bagi upaya pengembangan kualitas hidup. Kata-kata kunci tersebut yakni, komunitas, norma-norma, nilai-nilai, aksi bersama, tujuan bersama, dan kepentingan yang sama. Dengan demikian sebetulnya modal sosial tidak secara individual, tetapi melalui suatu interaksi sosial bersama. Pantoja (2002:119-120) misalnya, mengatakan bahwa *social capital is nested in structure and not within individuals*.

Kekuatan modal sosial, sesungguhnya memiliki aspek jaringan menjadi salah satu kunci yang terpenting untuk membangun hubungan antar individu dan antar kelompok. Melalui jaringan mereka saling tahu, saling menginformasikan, saling mengingatkan, saling bantu dalam melaksanakan atau mengatasi suatu masalah (Lawang, 2005:62; Coleman, 1999). Senada

dengan ini, Jacqueline Vel (2010, 217-218) dalam penelitiannya di NTT tentang “*economi umah*” menegaskan bahwa jaringan adalah bentuk orientasi dari para pelaku. Sehingga menurut Vel, jaringan hubungan, penting bukan hanya karena dapat memberikan akses ke berbagai sumber daya esensial, seperti modal atau tenaga kerja, tetapi juga dapat memberikan akses arus informasi dan dukungan bagi bagi peserta jaringan. Dengan demikian, jaringan menjadi penting. Karena itu, Vel sependapat dengan Wellman (Vel, 2010:219), bahwa jaringan (*Network*) diartikan sebagai pembentukan jaringan secara sengaja untuk mendukung tercapainya tujuan.

Sementara Bourdieu (2001; Prabawa, 2010:34-35) menekankan perbedaan modal sosial dalam masyarakat atau komunitas dengan individu. Perbedaan antara modal sosial dalam komunitas dan individu secara tegas oleh Bourdieu mendefinisikan konsep modal sosial dalam hal jaringan hubungan yang dapat bertahan lama pada aras individu (Prabawa, 2010). Karena itu modal sosial tidak terlepas dan erat berkaitan dengan konsep jaringan sosial. Individu akan memperoleh manfaat dari modal sosial jika mereka menyatu (*embedded*) dalam jaringan sosial yang memberikan suatu keadaan dalam hubungan sosial yang berkelanjutan (Prabawa, 2010:35). Kekuatan modal sosial pada individu yang terimplementasi dalam masyarakat juga ditunjukkan oleh pandangan Francis Fukuyama (2001:7; 2007:22-25): yang menyebut bahwa “*social capital is an instantiated informal norm that promotes co-operation between two or more individuals*” modal sosial secara sederhana merupakan serangkaian nilai-nilai atau norma-norma informal yang dimiliki bersama diantara anggota suatu kelompok yang memungkinkan terjalinnya suatu kerjasama diantara mereka”. Seperti telah diuraikan bahwa di dalam modal sosial, terdapat ukuran untuk menilai proses modal sosial dapat berlangsung seperti norma (*norm*), kepercayaan (*trust*) dan jaringan (*network*).

Walaupun memang modal sosial masih terus diperdebatkan (*debatable*), tetapi melalui pemikiran dan konsep tentang modal sosial ini, sudah sepatutnya menjadi perhatian untuk menganalisis kondisi kemiskinan masyarakat. Selain itu, modal sosial paling tidak dan atau mungkin saja dapat dipakai sebagai alat analisis dalam memetakan realitas kemiskinan.

Metode Penelitian

Penelitian ini akan dijelaskan dengan metode menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan jenis penelitian studi kasus. Tentang studi kasus, berdasarkan Konferensi Cambridge tahun 1976 menyebutkan (Liek Wilardjo, 1994: 4) bahwa:

“...studi kasus ialah istilah umum yang mencakup serumpun metode penelitian yang sama-sama memupulkan perhatian pada penelaahan di seputar suatu kejadian”.

Lebih lanjut Wilardjo (1994:4) menyebutkan bahwa metode ini berusaha memberikan penjelasan yang jujur dan seksama tentang kasus tertentu sedemikian rupa, sehingga memungkinkan pembacanya menembus ke dalam apa yang tampak ke permukaan dan juga untuk memeriksa kebenaran tafsiran penulisnya dengan meninjau sejumlah data objektif pilihan yang sesuai, yang dijadikan tumpuan untuk membangun studi kasus itu.

Lokasi (*locus*) penelitian sangat menentukan proses dan hasil yang akan dicapai. Penentuan lokasi penelitian seharusnya tidak sekedar asal memenuhi syarat ‘tertentu’. Ada empat pertimbangan pokok yang layak menjadikan Desa Rutong dan Desa Leahari sebagai lokasi penelitian; *pertama*, secara umum kondisi masyarakat katagori miskin di kedua desa ini, relatif dapat dikatakan homogen dalam kondisi sosial, ekonomi dan budaya. *Kedua*, umumnya masyarakat bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan. *Ketiga*, jarak tempuh untuk mencapai kedua desa ini relatif

lebih mudah, karena berada di pesisir pantai. Sementara enam desa lainnya berada pada posisi pegunungan. *Keempat*, program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan di kecamatan ini, pada umumnya sama, sehingga kedua desa ini dapat dikatakan representative mewakili desa-desa lainnya.

Sementara teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Teknik pengambilan sampling cara tersebut, secara sengaja informan ditentukan, termasuk telah mempertimbangkan aspek keterwakilan dan homogenitas informan. Informan yang terpilih untuk diwawancarai berjumlah delapan Kepala Keluarga (KK) kategori miskin. Mereka terwakili dari Desa Rutong dan Desa Leahari masing-masing sebanyak empat KK. Penentuan informan secara sengaja, berdasarkan pada tingkat kejenuhan data yang disampaikan berdasarkan pedoman wawancara. Selain melakukan wawancara dengan kepada desa setempat atau perangkat desa lainnya, perlu pula mengumpulkan bukti aktivitas, dokumen sekunder yang berkaitan dengan penelitian.

Pembahasan

Sesuai target, penelitian dilakukan untuk memudahkan proses identifikasi permasalahan dan membuat katagorisasi kelompok masyarakat miskin di kedua desa tersebut. Tentu diawali dengan bertemu kepala desa secara terpisah. Desa Rutong dan Desa Leahari, termasuk desa yang ditata rapih. Suasana desa cukup memberikan kesejukan. Maklum, banyak pepohonan besar yang berada di sekeliling rumah masyarakat, dekat dengan hutan pohon sagu, dan letak desa yang berhadapan dengan pantai. Wajar jika kesejukan karena angin meniup dari segala arah.

Kecamatan Leitimur Selatan (Leisel), terdiri dari Desa Rutong, Desa Leahari, Desa

Naku, Desa Kilang, Desa Hukurila, Desa Ema, Desa Hatalai, Desa Hutumury. Untuk mencapai kecamatan ini, membutuhkan waktu tempuh sekitar satu jam, dan tiga puluh menit perjalanan darat, ke arah timur Kota Ambon. Jarak tempuh ± 15 km (Kecamatan Leisel dalam Angka, 2012). Kecamatan ini, merupakan salah satu kecamatan yang telah dimekarkan dari Kecamatan Teluk Ambon Baguala pada tahun 2006. Sebelumnya Kota Ambon terdiri dari tiga kecamatan, masing-masing Kecamatan Sirimau, Kecamatan Nusaniwe dan Kecamatan Teluk Ambon Baguala. Pemekaran dilakukan hanya pada Kecamatan Teluk Ambon Baguala, yang menambah dua kecamatan baru yakni, Kecamatan Leitimur Selatan dan Kecamatan Teluk Ambon.

Secara geografis, Wilayah Kecamatan Leitimur Selatan memiliki batas-batas pada sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Teluk Ambon Baguala, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Banda, sebelah Timur Laut Banda dan sebelah Barat berbatasan dengan Desa Soya Kecamatan Sirimau dan Desa Urimesing Kecamatan Nusaniwe (Kecamatan Leisel dalam Angka, 2012). Pusat ibu kota kecamatan berada di Desa Leahari. Sementara jarak antara Desa Rutong ke pusat kecamatan hanya 1,10 km. antara Desa Leahari dan Desa Rutong, letaknya bersebelahan, dan berada di pesisir pantai. Berdasarkan data Kecamatan Leisel dalam Angka (2012) Penduduk tercatat di Kecamatan Leitimur Selatan sebanyak 9.661 jiwa, dengan komposisi 4.372 penduduk laki-laki dan 4.941 penduduk perempuan. Dengan kepadatan penduduk sebesar 191 jiwa tiap km².

Terhadap sebaran jumlah penduduk per desa di Kecamatan Leitimur Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Luas Desa/Kelurahan, Jumlah Penduduk,
Sex Ratio dan Kepadatan Penduduk Dirinci
perdesa/Kelurahan di Kecamatan Leitimur Selatan 2011

Desa/ Kelurahan	Lusa Desa (km ²)	L	P	J	Sex Ratio	Kepadatan Penduduk/(km ²)
Naku	5,00	348	363	711	95,87	142
Kilang	5,00	435	426	861	102,11	172
Hukurila	7,50	327	293	620	111,60	83
Ema	3,00	342	388	730	88,14	243
Hatalae	5,00	510	553	1.063	92,22	213
Hutumuri	15,00	2.047	2.165	4.212	94,55	281
Rutong	5,00	376	433	809	86,84	162
Leahari	5,00	335	320	655	104,69	131

Sumber: Kecamatan Leitimur Selatan dalam Angka tahun 2012 (data diolah)

Sebaran tempat tinggal dan perumahan penduduk di Desa Rutong berada pada dua Rukun Warga (RW), dan lima Rukun Tetangga (RT), selanjutnya untuk Desa Leahari memiliki satu Rukun Warga (RW), dan tiga Rukun tetangga (RT). Sementara luas kedua desa ini tergolong kecil yang hanya 5,00 km².

Jumlah keluarga miskin di Desa Rutong sebanyak 30 KK, dan di Desa Leahari sebanyak 36 KK. Setiap desa ditentukan sebanyak 4 KK untuk mewakili informan yang lain. Yang patut diungkapkan pula bahwa umumnya dari hasil wawancara, ternyata data yang dikemukakan cenderung sama (data jenuh), sehingga data tersebut dapat dikatakan telah memenuhi unsur validitas.

Berdasarkan data empiris ditemukan secara umum, para informan memiliki tingkat pendidikan yang sangat rendah, hanya lulusan SD dan tidak tamat SMP. Padahal pendidikan adalah basis pengembangan pengetahuan. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin terbuka peluang pengetahuan dipakai untuk kemudahan mengakses sumber pekerjaan dan finansial.

Kondisi Ekonomi Keluarga

Bagian ini menggambarkan situasi ekonomi rumah tangga keluarga sehari-hari. Satu dari enam keluarga yang dijadikan

informan, menjelaskan tentang kehidupan sehari-hari. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, mereka mengandalkan hasil kebun, hutan dan atau ikan laut, yang dibeli setelah nelayan se desanya melaut. Ada juga beberapa keluarga lain yang harus berjualan hasil kebun ke pasar di Kota Ambon. Meskipun kadang-kadang keuntungan relatif terbatas, atau bahkan tidak tidak diperoleh sama sekali. Jika barang dagangan tidak habis terjual, diupayakan agar paling tidak, modal bisa kembali. Dengan harapan modal ini dapat diputar pada hari berikutnya. Bagi mereka, yang terpenting ada sedikit uang untuk makan sehari-hari atau untuk keperluan anak-anak sekolah. Kondisi ini diutarakan oleh ibu Eta Suripet (40 tahun). Lebih lanjut menurut ibu Eta, kehidupan sehari-hari, terutama makan dan minum diupayakan secara maksimal. Dia berjualan di pasar membantu suaminya yang hanya bekerja sebagai petani. Untuk saat ini, mereka belum berpikir untuk merenovasi rumah. Walaupun kini rumah mereka hanya berdinding pelepah/batang dan beratapkan daun rumbia (pohon sagu). Lebih lanjut menurutnya, selama ini, program bantuan bagi keluarga miskin di desa belum secara merata dilaksanakan. Dia mencontohkan, yang diperoleh hanya beras bagi keluarga miskin (Raskin), yang dibeli Rp.6.000/kg. Sementara program yang lain, belum pernah

diterima, seperti Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP).

Kondisi yang hampir serupa juga dialami oleh informan, keluarga Sopie Makatita (54 tahun). Saat peneliti berkunjung ke rumahnya ibu Sopie sementara terbaring sakit, sehingga wawancara dilakukan dengan salah seorang anak bernama Jemmy (39 tahun). Sejak suami ibu Sopie meninggal, praktis kebutuhan sehari-hari keluarga dan biaya sekolah anak-anak, diperoleh dari penjualan hasil kebun. Luas kebun yang mereka miliki sekitar satu hektar. Kebun tersebut beraneka tanaman seperti cengkih, pala, duren, kelapa dan langsung. Jika musim buah tertentu hasilnya dapat dijual di desa atau dijual ke pasar Ambon. Jemmy sang anak, lulusan SMA. Pekerjaannya serabutan dan penghasilan tidak menentu. Kadang-kadang sebagai tukang bangunan, kadang melaut sebagai nelayan. Kedua pekerjaan ini, biasanya dilakukan sesuai musim per enam bulan. Saat musim barat antara bulan Januari-Juni, Jemmy menjadi nelayan bersama rekan-rekannya. Pada saat bulan Juli-Desember musim barat, lautan tidak bersahabat. Angin dan gelombang laut cukup tinggi, sehingga mereka tidak bisa melaut. Waktu tersebut kemudian dimanfaatkan bekerja sebagai kuli bangunan.

Dalam wawancara, menurut Jemmy, program-program bagi masyarakat miskin yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Ambon belum maksimal terselesaikan. Dia memberikan contoh, rumah mereka difasilitasi oleh program P2KP. Rumah tersebut hanya direnovasi dan ditata sesuai dengan kondisi ruang sebelumnya. Sebelum direnovasi, rumah mereka terbuat dari batang/pelelepah dan atap dari daun rumbia (pohon sagu). Kemudian diganti dengan batu konblok dan semen. Bagian dalam rumah telah dihaluskan dengan semen (plester), sementara bagian luar tidak diselesaikan. Sementara untuk kelengkapan seperti aliran listrik, pemasangan daun pintu dan jendela

harus diusahakan sendiri oleh pemilik rumah. Bagi Jemmy, untuk makan sehari-hari mereka sangat terbatas, apalagi harus memasang aliran listrik dan membeli daun pintu atau jendela, pasti sangat sulit (lihat gambar di atas). Akibatnya rumah yang difasilitasi oleh program tersebut tidak tuntas. Untuk penerangan rumah, mereka meminta satu aliran listrik dari keluarga tetangga. Kemudian setiap bulan mereka harus membayar biaya sebesar Rp10.000.

Setiap keluarga di kedua desa tersebut saling membantu satu dengan yang lain. Ikatan kekeluargaan tercermin dalam kelompok usaha bersama, baik kegiatan perikanan, pertukangan maupun pada area pertanian. Kekerabatan (norma) yang kuat menjadikan mereka saling membutuhkan untuk saling mengisi kekuarangan.

Baik ibu Eta, maupun Jemmy adalah pekerja keras. Perjuangan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Tentu dibutuhkan ketekunan, kesetiaan, pantang menyerah, jujur dan tetap berdoa kepada Sang Pencipta untuk meminta kekuatan dan berkat adalah prinsip hidup. Itulah makna hidup yang keduanya sampaikan untuk mengatasi kebutuhan keseharian. Walaupun demikian, situasi ini mesti menjadi perhatian pemerintah daerah untuk turut serta memberikan perhatian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan warganya.

Namun, faktanya peran Pemerintah Kota Ambon dalam membantu warga masyarakat miskin, masih tertatih-tatih. Belum banyak perubahan yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Program yang dihasilkan, umumnya merupakan program turunan secara nasional, seperti pemberian beras bagi keluarga miskin (Raskin), program bantuan pemberdayaan ekonomi dan program penanggulangan kemiskinan di perkotaan (P2KP). Sebagai program turunan secara nasional, pemerintah kota mengalami kesulitan dana. Untuk membiayai pelaksanaan kegiatan tersebut, dana harus diberikan dari pemerintah pusat (Jakarta), pada sisi lain, jumlah keluarga miskin yang akan dibantu, terbatas dengan

kuota dan jumlah berbasis penyediaan dana. Akibatnya penentuan keluarga penerima manfaat terbatas.

Implikasi terhadap situasi tersebut, terjadi dalam dinamika pemerintahan pada kedua desa tersebut. Masyarakat—khususnya keluarga katagori miskin, pada umumnya mempertanyakan persyaratan dan kriteria penerima bantuan. Mengingat, keluarga miskin yang terdaftar tidak seluruhnya menerima bantuan. Kondisi ini diakui oleh kedua Kepala Desa. Hal senada juga diungkapkan Kepala Urusan Pemerintahan (KAUR) Desa Leahari. Lebih lanjut menurut yang bersangkutan, salah satu bantuan bagi keluarga miskin adalah pemberian bantuan beras bagi keluarga miskin. Beras yang dialokasikan kepada Desa Leahari seharusnya sesuai jumlah keluarga miskin. Tetapi ternyata alokasi beras ke desa tidak sesuai dengan jumlah keluarga miskin. Untuk mencegah konflik dalam masyarakat, Kepala Desa memutuskan untuk membagi beras tersebut secara merata. Cara ini untuk menjaga agar dalam masyarakat tidak terjadi perpecahan.

Kondisi yang hampir serupa juga terjadi pada beberapa program yang lain, seperti pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemberian bantuan seperti bibit hewan peternak; ayam kampung, pemberian dari instansi terkait, sering tidak melibatkan pihak pemerintah desa. Pada waktunya ketika program tersebut direalisasikan, ternyata ada keluarga yang seharusnya menerima, tidak menerima, dan sebaliknya. Akhirnya banyak muncul pertanyaan masyarakat dan membuat kecurigaan masyarakat terhadap aparat desa.

Padahal diharapkan agar program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat diupayakan dapat terimplementasi secara efektif dan efisien. Program tersebut seharusnya peka terhadap kebutuhan masyarakat sehingga merupakan solusi bagi pengentasan persoalan sosial kemasyarakatan, khususnya upaya pengentasan kemiskinan. Program-program pemberdayaan ini harus dilakukan secara

kesinambungan dan tetap mengacu pada perubahan-perubahan dalam masyarakat.

Kesimpulan

Salah satu target keberhasilan program kerja Pemerintah Kota Ambon adalah mengurangi angka kemiskinan. Target pengurangan angka kemiskinan masyarakat, merupakan program kerja besar, yang membutuhkan kerja keras dari pemerintah kota, yang didukung oleh masyarakat. Termasuk pihak ketiga seperti LSM, Swasta, Perguruan Tinggi dan kelompok kepentingan lainnya. Pada posisi ini sinergisitas antar institusi sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas ini. Karena itu, ketika pemerintah kota dengan serius ingin mengurangi angka kemiskinan di masyarakat, maka salah satu pilihan untuk memperbaiki kegiatan yang telah dilaksanakan adalah dengan membuat proses evaluasi secara berkelanjutan. Atas dasar itu, Pemerintah Kota Ambon, telah berupaya melahirkan kegiatan untuk mengatasi masalah kemiskinan di masyarakat. Namun, bukan berarti bahwa kegiatan tersebut telah berjalan sesuai dengan harapan, masih diperlukan langkah-langkah yang tepat untuk terus memperbaiki mekanismenya.

Sesuai temuan dalam penelitian ini, maka kesimpulan yang ditemui antara lain; (a). rata-rata tingkat kehidupan KK miskin pada kedua desa ini, cenderung tidak mengalami perubahan. Pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari hanya ditentukan dari kegiatan rutin sebagai petani atau buruh tani. Tambahan terhadap pendapatan keluarga diperoleh dari pekerjaan serabutan lain yang tidak tetap. Tumpuan kebutuhan hidup hanya mengandalkan dari sumber lahan yang tidak seberapa tersedia. (b), Pemerintah Kota Ambon, dalam mengatasi permasalahan kemiskinan warganya, belum memunculkan model tersendiri. Program dan metode masih menggunakan bentuk program kemiskinan turunan dari Pemerintah Pusat (Jakarta), seperti Raskin, Jamkesmas, P2KP, dan bantuan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Sementara data yang dipakai masih merujuk pada data standarisasi dari Badan Pusat Statistik. Basis data ini pula yang mengakibatkan, sebagian masyarakat memperlmasalahkannya saat implementasi program pengentasan kemiskinan.

Karena itu, berdasarkan kesimpulan penelitian yang ada, maka terdapat beberapa pemikiran sebagai bentuk rekomendasi kebijakan. Rekomendasi ini untuk memperbaiki dan melengkapi mekanisme kegiatan yang diarahkan bagi upaya mengurangi angka kemiskinan dalam masyarakat yang telah dijalankan sebelumnya. Pikiran ini dimaksudkan agar di masa mendatang, kendala dan tantangan yang dihadapi masyarakat akan semakin lebih baik. Untuk itu, pikiran rekomendasi dapat dikemukakan sebagai berikut:

Pertama, pembenahan dan pemutakhiran data jumlah keluarga miskin di Kota Ambon, yang tersebar di berbagai lokasi desa dan kelurahan, diharapkan secara berkala dilakukan pemutakhiran. Terutama proses identifikasi dengan menggunakan persyaratan dan kriteria yang tepat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, terdapat dalam data keluarga miskin yang selayaknya tidak lagi dikategorikan sebagai keluarga miskin.

Kedua, persyaratan penerima bantuan bagi keluarga miskin hendaknya dikoordinasikan melalui kepala pemerintahan setempat. Sebagian keluarga miskin penerima bantuan, tidak diketahui oleh perangkat pemerintah desa setempat. Kondisi ini mengakibatkan pemerintah desa setempat tidak mengetahui tentang anggota masyarakat yang akan menerima bantuan.

Ketiga, *need assessment* terhadap keluarga kategori miskin, mutlak diperlukan. Karena *need assessment* merupakan salah satu langkah tepat sebelum implementasi kegiatan. Pertimbangan terhadap kegiatan ini merujuk pada temuan lapangan bahwa terdapat beberapa keluarga miskin, yang layak menerima bantuan, justru terabaikan.

Keempat, pendampingan dan monitoring secara berkala. Proses

pendampingan dan monitoring dari pihak pemerintah kota, wajib dilakukan secara berkala dalam waktu yang disesuaikan. Pendampingan akan menjadi kekuatan bagi masyarakat untuk mengembangkan kemandirian. Sementara monitoring menjadi media perkuatan kepedulian pemerintah terhadap perubahan yang terjadi dengan keluarga sasaran.

Kelima, mendayagunakan potensi lokal dan sumber daya lokal sesuai karakteristik wilayah. Point ini menjadi salah satu aspek penting dalam upaya memberdayakan masyarakat lokal. Kepemilikan sumber daya lokal; alam dan manusia adalah aspek utama membangkitkan ekonomi setiap wilayah. Karakteristik wilayah yang berbeda-beda dapat dijadikan modal dasar dalam membangun masyarakat dan wilayahnya. Kepemilikan sumber daya lokal dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya dengan menggerakkan masyarakat sebagai tonggak utama. Identifikasi, inventarisasi dan katagorisasi berdasarkan keunggulan wilayah menjadi kegiatan utama.

DAFTAR PUSTAKA

- Callois, J. M and V. Angeon. 2004, *On the role of social capital on local economic development - An econometric investigation on rural employment areas in France*, AES Conference 2004.
- Commission Research Paper, 2003, *"Social Capital: Reviewing the Concept and Its Policy Implications"*. Commonwealth of Australia.
- Coleman, J, 1990 *"The Foundations of Social Theory"*. Harvard: Harvard University Press.
- Bryceson Deborah Fahy, 1999 *"African Rural Labour, Income Diversification & Livelihood Approaches"*. A Long-term Development Perspective Review of African Political Economy

- No.80:171-189 © ROAPE Publications Ltd., 1999 ISSN 0305-6244.
- Fukuyama. Francis, 2007 *"The Great Disruption; Human Nature and The Reconstitution of Social Order"*. Penyunting Dede Nurdin. Penerbit Qalam.
- Fukuyama Francis, 2001 *"Social Capital, Civil Society and Development"*. *Third World Quarterly*, Vol 22, No 1, pp 7–20, 2001.
- Gibson, James. L, James Jr. Donelly dan John. M. Ivancevic, 1997 *"Manajemen"*. Edisi ke sembilan. Penerbit Erlangga Jakarta.
- , 1996 *"Organization, Behavior, Structure and Process. 5th edition. Jilid I, Business Publication Inc.* Alih bahasa Savitri Soekrisno dan Dharma Agus. Penerbit Erlangga.
- , 1996 *"Organization, Behavior, Structure and Process. 5th edition. Jilid II, Business Publication Inc.* Alih bahasa Savitri Soekrisno dan Dharma Agus. Penerbit Erlangga.
- Kusnadi, 2006 "Lingkungan dan Kemiskinan". *Jurnal Perspektif*. UNS. Surakarta
- Lawang Robert M.Z, 2005 *"Kapital Sosial Dalam Perspektif Sosio-logik"*. Penerbit Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
- Marschke1 Melissa J. and Fikret Berkes, 2006 *"Exploring Strategies that Build Livelihood Resilience: a Case from Cambodia"*. <http://www.ecologyandsociety.org/vol11/iss1/art42/>.
- Pantoja Enrique, 2002 *"Qualitative Analysis of Social Capital: The Case of Community Development in Coal Mining Areas in Orissa, India"*. Within Christian Grootaert and Thierry van Bastelar *"Understanding and Measuring Social Capital: A Multi-disciplinary Tool for Practitioners"*. The World Bank Washington D.C.
- Prabawa Titi Susilowati, 2010 *"The Tourism Industry Under Crisis; The Struggle of Small Tourism Enterprise in Yogyakarta (Indonesia)"*. Dissertation from Faculteit der Sociale Vrije University Amsterdam Belanda.
- Priyanto Sonny Heru, 2008 *"Di Dalam Jiwa Ada Jiwa: The Backbone and The Social Construction of Entrepreneurship"*. Buku Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.
- Rahoyo Stefanus, 2010 *"Dilema Tionghoa Miskin"*. Penerbit Tiara Wacana Jogjakarta.
- Reksohadiprojo, Sukanto, 1999 *"Organisasi Perusahaan"*. Edisi kedua. Penerbit BPFE Jogjakarta
- Ritonga, Irwan Taufiq. 2010. *Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah di Indonesia*. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM
- Sanapiah Faisal, 2001 *"Format-Format Penelitian Sosial"*. Penerbit PT. RajaGrafindo Persada Jakarta.
- Serageldin, Ismail and Christian Grootaert, *Defining Social Capital: An Integrating View*" dalam Dasgupta, Partha and Ismail Serageldin. 1999, *Social Capital – A Multifaceted Perspective*, The World Bank, Washington D.C.

- Soegijono Simon P, 2000 "*Kinerja usaha industri kecil dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kajian pada Industri Kecil Kerajinan Rotan di Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah.*" Penerbit Program Pascasarjana UKSW Salatiga
- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta
- Stake. Roberth. E "*Case Studi*". dalam Denzin K. Norman and Lincoln Yvonna.S, 1997 "*Handbook of Qualitative Research*". Sage Publication. Pvt. Ltd. Penerjemah Dariyatno dkk, 2009. Pustaka Pelajar Jogjakarta.
- Suwarto, FX, 1999 "*Perilaku Keorganisasian*". Cetakan pertama. Penerbit Universitas Atmajaya Jogjakarta.
- Turner Jonathan.H, 2000 "*The Formation of Social Capital*". dalam Dasgupta, Partha and Ismail Serageldin. 1999, *Social Capital – A Multifaceted Perspective*, The World Bank, Washington D.C.
- Vel Jacqueline, 2010 "*The Uma –Economy: Idegeneus economics and Development Work ini Lawonda, Sumba (Eastern Indonesia)*". Edisi Terjemahan "*Ekonomi-Uma: Penerapan Adat dalam Dinamika Ekonomi Berbasis Kekerabatan*". Penerbit HuMa Jakarta.
- Wayong, J. 1962. *Fungsi Administrasi Negara*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Wilardjo Liek, 1994, "*Studi Kasus: Sebuah Panduan Praktis*". saduran buku dari Penulis Nisbet J dan Watt. J. Penerbit kerjasama Satya Wacana University Press dan PT Gramedia Widiasarana Indonesia Jakarta.
- Yuwono Prapto, 2005 "*Kemiskinan Spiritual*". Jurnal Kritis Multidisplin. Penerbit Pascasarjana Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.
- Badan Pusat Statistik di Indonesia, 2010. <http://www.bps.go.id/>. Dikunjungi, 17 September 2011.
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), 2011. "*Indikator Kesejahteraan Daerah Provinsi Maluku*". Penerbit Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia.
- Kantor Bank Indonesia Maluku Laporan Perkembangan Perekonomian Provinsi Maluku Tahun 2011
- Dinas Koperasi, Usaha Menengah, Kecil dan Mikro Kota Ambon. Laporan Perkembangan Koperasi UMKM di Kota Ambon.
- Pusat Data dan Informasi Kemiskinan Departemen Sosial RI. <http://kfm.depsos.go.id/mod.php?mod=tabulasi>.
- Kota Ambon Dalam Angka Tahun 2007. Penerbit Badan Pusat Statistik Pemerintah Kota Ambon.